

TESIS
PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA
YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN



Oleh

FREDERIKUS SALAMA

NIM. 2320215310103

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

TESIS
PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA
YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN



Oleh

FREDERIKUS SALAMA

NIM. 2320215310103

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

**PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA
YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**FREDERIKUS SALAMA
NIM. 2320215310103**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JUNI 2025**

**Judu Tesis : PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA
YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**Nama : Frederikus Salama
NIM : 2320215310103**

**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syauffi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frederikus Salama

NIM : 2320215310103

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 28 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Frederikus Salama

NIM. 2320215310103

SALAMA, FREDERIKUS. 2025. PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 halaman.

RINGKASAN

Permasalahan mengenai kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja dalam konteks hubungan kerja masih menjadi topik yang menimbulkan perdebatan dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Ketentuan hukum yang mengatur tentang kesalahan berat sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, sehingga memunculkan kekosongan hukum dan ketidakjelasan norma dalam menilai jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat yang layak dikenai pemidanaan. Terdapat tumpang tindih antara tindakan indisipliner, pelanggaran norma kerja, dan tindakan pidana yang berujung pada pemidanaan terhadap pekerja, meskipun kadangkala tidak memenuhi unsur pidana. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan penggunaan pemidanaan secara eksekutif oleh pengusaha dan penegak hukum yang dapat merugikan hak-hak pekerja. Padahal, hukum pidana dalam sistem ketenagakerjaan seharusnya menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam batasan kesalahan berat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji secara kritis penerapan prinsip keadilan, baik keadilan prosedural, keadilan substantif, maupun keadilan restoratif dalam proses pemidanaan terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam penyusunan norma yang lebih adil dan perlindungan hukum yang proporsional terhadap pekerja. Selain itu, penelitian ini memiliki kegunaan praktis dalam memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pelaku hubungan industrial agar lebih selektif dan objektif dalam menangani kasus pelanggaran berat di tempat kerja, serta menghindari kriminalisasi terhadap pekerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku sebagai dasar dalam menjawab isu-isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sinkronisasi dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang mengatur kesalahan berat dan pemidanaan dalam hubungan kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk

menelaah teori-teori hukum pidana dan teori keadilan yang relevan dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pekerja atas dasar kesalahan berat. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masih terdapat kekosongan dan ketidakkonsistenan norma hukum dalam menetapkan parameter kesalahan berat yang dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemidanaan terhadap pekerja atas dasar pelanggaran internal perusahaan masih sering terjadi tanpa didahului pemeriksaan unsur pidana secara objektif. Hal ini berpotensi mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Prinsip *ultimum remedium* belum diterapkan secara konsisten, sehingga pemidanaan sering kali menjadi langkah pertama, bukan terakhir. Dalam konteks ini, penting diterapkan pendekatan keadilan prosedural yang menjamin hak-hak pekerja selama proses hukum berlangsung, keadilan substantif yang mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi, serta keadilan restoratif yang memfokuskan pada pemulihan hubungan kerja dan keadilan sosial. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pekerja atas dasar kesalahan berat harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menghilangkan keseimbangan antara hak pengusaha dan perlindungan terhadap pekerja. Reformulasi kebijakan hukum ketenagakerjaan dan peradilan pidana dalam sektor ini perlu dilakukan, dengan tetap menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha tanpa mengorbankan keadilan bagi pekerja.

SALAMA, FREDERIKUS 2025. PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Pidana Ketenagakerjaan, Kesalahan Berat, Perspektif Keadilan

Penelitian ini berjudul Pidana Ketenagakerjaan terhadap Pekerja yang Melakukan Kesalahan Berat dalam Perspektif Keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan kesalahan berat yang dapat dikenai pidana dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses pemidanaan terhadap pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam perlindungan terhadap hak pekerja sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pengusaha.

Ketentuan hukum positif Indonesia belum memberikan batasan yang tegas dan konsisten mengenai kriteria kesalahan berat yang layak dikenai sanksi pidana. Pembatalan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya kekosongan norma yang berdampak pada ketidakteraturan dalam praktik ketenagakerjaan. Akibatnya, kesalahan berat seringkali ditafsirkan secara subjektif oleh pengusaha tanpa pembuktian hukum yang memadai, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap pekerja. Padahal, tidak semua pelanggaran disiplin dalam hubungan kerja mengandung unsur pidana.

Prinsip keadilan, baik prosedural, substantif, maupun restoratif, belum sepenuhnya diterapkan dalam pemidanaan terhadap pekerja. Proses hukum seringkali tidak memberikan ruang pembelaan yang seimbang bagi pekerja, sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional, dan tidak terdapat upaya pemulihan hubungan kerja secara manusiawi. Oleh karena itu, pemidanaan dalam konteks ketenagakerjaan harus dijadikan jalan *terakhir* (*ultimum remedium*) dan diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara ketertiban kerja dan perlindungan hak asasi pekerja.

SALAMA, FREDERIKUS. 2025. LABOR CRIMINAL LAW AGAINST WORKERS WHO COMMIT GROSS MISCONDUCT FROM A JUSTICE PERSPECTIVE. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: Labor Criminal Law, Gross Misconduct, Justice Perspective

This research is entitled Labor Criminal Law Against Workers Who Commit Gross Misconduct from a Justice Perspective. The objective of this study is to analyze the boundaries of gross misconduct that may be subjected to criminal sanctions under Indonesian labor law and to evaluate the application of the principle of justice in the criminalization process against workers. This research employs a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The study is expected to contribute to the reform of labor law, particularly in enhancing the protection of workers' rights while also ensuring legal certainty for employers.

Indonesian positive law has not yet provided clear and consistent criteria for what constitutes gross misconduct warranting criminal punishment. The annulment of Article 158 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower by the Constitutional Court has created a legal vacuum, leading to inconsistencies in labor practices. As a result, gross misconduct is often interpreted subjectively by employers without sufficient legal justification, thereby increasing the risk of criminalizing workers. In fact, not all disciplinary violations in the workplace contain elements of criminal acts.

The principles of justice—procedural, substantive, and restorative—have not been fully implemented in the criminal justice process against workers. Legal procedures often fail to provide balanced defense opportunities for workers, sanctions imposed are disproportionate, and there is a lack of humane efforts to restore industrial relations. Therefore, criminal punishment in the labor context must be treated as a last resort (ultimum remedium) and oriented toward achieving a balance between workplace order and the protection of workers' fundamental rights.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pidana Ketenagakerjaan terhadap Pekerja yang Melakukan Kesalahan Berat dalam Perspektif Keadilan”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Tesis ini lahir dari keprihatinan penulis terhadap ketidakjelasan batasan hukum mengenai kesalahan berat yang dapat dikenai sanksi pidana dalam praktik hubungan kerja di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berdampak pada perlindungan hukum bagi pekerja, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan hukum pidana dalam relasi industrial. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis normatif mengenai aspek batasan normatif kesalahan berat serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pemidanaan terhadap pekerja. Penulis berharap bahwa kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menciptakan iklim akademik yang kondusif, mendukung penuh proses penyelenggaraan pendidikan pada Program Magister Hukum, serta senantiasa menunjukkan komitmen tinggi dalam mengembangkan mutu akademik dan integritas keilmuan. Perhatian dan kebijakan yang Bapak berikan sangat berarti bagi kelancaran studi penulis dan mahasiswa lainnya.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan yang ramah, profesional,

dan solutif, sehingga proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang berarti.

3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Utama, yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis sejak awal hingga tahap akhir penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi yang mendalam selama masa perkuliahan. Ilmu yang diperoleh dari para dosen menjadi fondasi utama dalam merumuskan dan menyelesaikan penelitian ini secara ilmiah.
5. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum, yang telah memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan solutif, sehingga proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang berarti.
6. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semangat kebersamaan, kerja sama dalam diskusi akademik, serta dukungan moral yang sangat membantu selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan manfaat akademik dan praktis, serta menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2025

Penulis,

Frederikus Salama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.. ..	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	27
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	34
BAB II BATASAN KESALAHAN BERAT YANG DAPAT DIPIDANA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA.....	36
A. Konstruksi mengenai Kesalahan Berat dalam Konteks Hukum Ketenagakerjaan.....	36
B. Perbedaan antara Pelanggaran Disiplin, Kesalahan Berat, dan Tindak Pidana.....	48
C. Pembatasan Pidanaan terhadap Pekerja dalam Perspektif <i>Ultimum Remedium</i> dan Prinsip Keadilan..	58

BAB III PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT.....	69
A. Keadilan Prosedural dalam Proses Pemidanaan terhadap Pekerja.....	69
B. Keadilan Substantif dalam Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pekerja.....	79
C. Keadilan Korektif dan Restoratif dalam Penyelesaian Kesalahan Berat oleh Pekerja.....	88
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

